

Abstrak

IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP INDIKASI PELANGGARAN HUKUM ATAS AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Di Kabupaten Bogor)

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan profesinya baik sengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Daerah dan Kepolisian. Notaris yang mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas memberikan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris kaitannya dengan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta yang dibuat dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, dengan menggunakan data primer yang didukung data sekunder. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer data sekunder. selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan dengan metode deduktif. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris kaitannya dengan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta yang dibuat, yaitu Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta; 2) Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya tetap diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian mewajibkan notaris tersebut memberikan

keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materil akta.

Kata Kunci : Tanggung jawab notaris, Kewenangan, Pelanggaran.

Abstract

IMPLEMENTATION OF LOCAL AUTHORITY BOARD OF SUPERVISORS OF LIABILITY WITH RESPECT TO NOTARY NOTARY LAW VIOLATION OF THE INDICATION DEED MADE (Studies at Bogor Regency)

Notary who violates the duties of his profession and whether intentionally or through negligence now can not be quiet anymore. The parties who feel aggrieved can make a complaint to the Regional Council of Trustees and the Police. Notary office and neglect of duty of the dignity and nobility of violating the Notary Act and other legislation the Board of Trustees to act decisively to sanction. It can even provide recommendations to the Minister of Justice and Human Rights to revoke the operating license. To the notary in question was likely to be prosecuted, either in civil and criminal cases.

The purpose to be achieved in this study were: to know the implementation of the authority of the Regional Council of Notaries Supervisory responsibilities related to violations of the law on notary deed made and responsibilities of notaries in the event of any violation of law on deeds made

From the approach used in this study is an empirical juridical, using primers dat data supported the secondary. The nature of this research is descriptive analysis. Data analysis was performed by collecting primary data secondary data. then performed a qualitative evaluation and analysis to address issues with laws and regulations based on deductive methods. Description of the analysis results are described qualitatively.

The results can be seen that: 1) Implementation of the authority of the Regional Council of Notaries Supervisory responsibilities related to violations of the law on notary deed made, the Board of Trustees has the authority to supervise Notary administratively oversee the notary to make a deed in accordance with the provisions UUJN not supervise the manufacture of material and the contents of the deed; 2) The responsibility of the notary in the event of any violation of law on the deed which made the realm of work is still required even though the notary in the realm of civil law and administrative law as well as moral and ethical responsibility, but to the deed made and indications of a criminal act, the notary must criminally responsible, began the examination in the investigation to the evidence at trial and carry out the decisions of judges are legally binding, thus requiring a notary is providing the information and testimony related to the formal and material aspects of the deed.

Keyword: Responsibility Notary, Authority, Violation.